



# LKjIP

# 2023

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Sumenep

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi,

efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep,       Maret 2024

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN SUMENEP



**CHAINUR RASYID, SE, M.Si**  
NIP. 19691113 199503 1 003  
Pembina Utama Muda

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>7</b>
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>24</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	62
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>82</b>
<b>SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH</b>	<b>83</b>
<b>MATRIKS RENSTRA</b>	<b>84</b>
<b>SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>85</b>
<b>PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

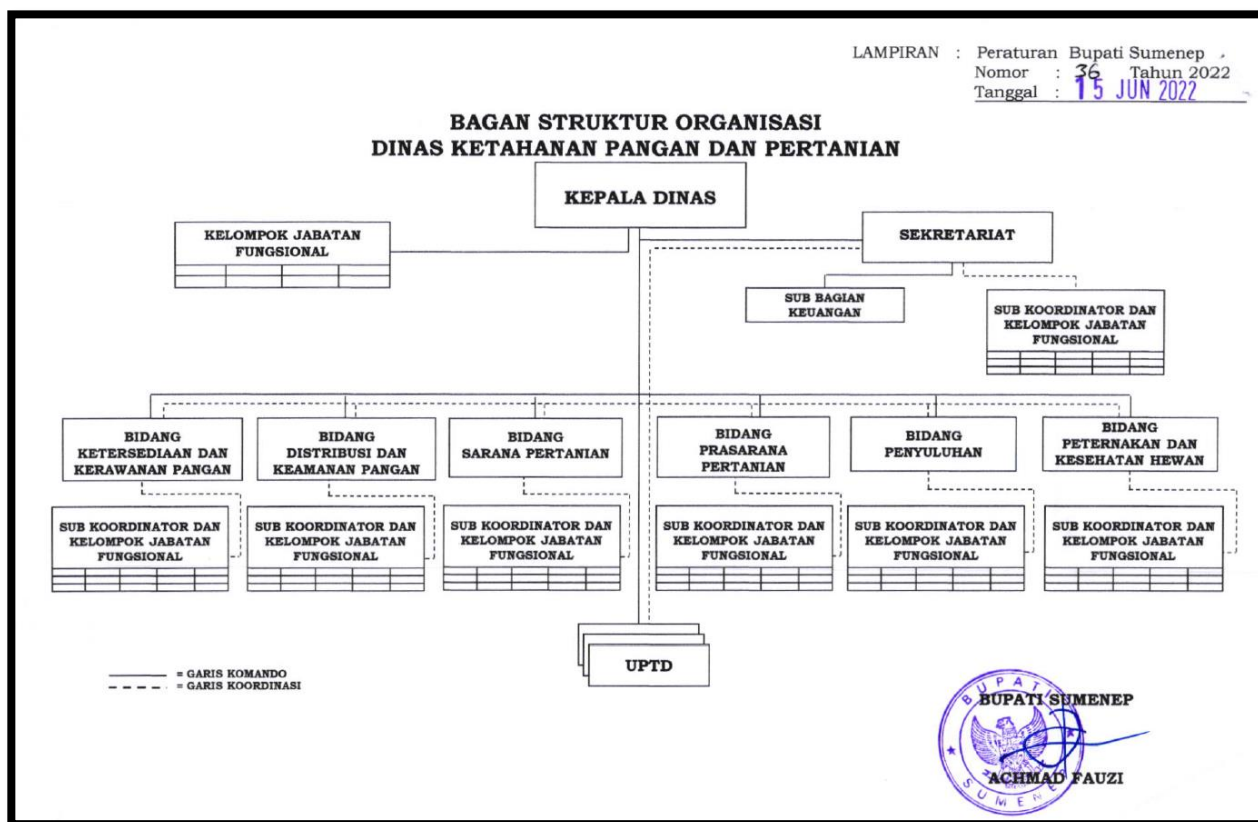
Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep mempunyai tugas: membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan bidang ketahanan pangan dan pertanian serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas KETahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.

**Gambar 1.1.**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep**



Sumber : Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2022

### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Banyaknya lahan pertanian potensial yang belum digarap;
2. Minimnya sumber daya penggarap lahan pertanian;



3. Belum diterapkannya LP2B secara massif;
4. Kemampuan petani dalam hal pengolahan dan pemasaran perlu terus ditingkatkan;
5. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pertanian sesuai dengan kebutuhan;
6. Banyak komoditi yang ditanam belum sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan;
7. Belum optimalnya produksi yang dihasilkan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep periode 2021- 2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Banyaknya lahan pertanian potensial yang belum digarap
2. Belum diterapkannya LP2B secara massif;
3. Kemampuan petani dalam hal pengolahan dan pemasaran perlu terus ditingkatkan;
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pertanian sesuai dengan kebutuhan;
5. Belum optimalnya produksi yang dihasilkan

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Sumenep;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- |         |   |
|---------|---|
| BAB I   | <b>PENDAHULUAN</b><br>Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.        |
| BAB II  | <b>PERENCANAAN KINERJA</b><br>Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.  |
| BAB III | <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b><br>Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV  | <b>PENUTUP</b>  |

# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

***“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”***

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 2 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang dintervensi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.	Meningkatkan Derajat dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**1. Tujuan dan Sasaran Renstra**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diintervensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	103	104	105	106	107
2	Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan					
			1. Tanaman Pangan (ton/ha) :					
			- Padi	5,36	5,38	5,41	5,44	5,46
			- Jagung	3,04	3,07	3,10	3,14	3,17
			- Kedele	1,39	1,39	1,39	1,39	1,40
			- Kacang Hijau	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
			- Ubi Kayu	15,07	15,11	15,16	15,20	15,25
			2. Hortikultura (kw/ha) :					

			- Bawang Merah	71,79	72,49	73,20	73,90	74,68
			- Cabe Besar	40,850	41,230	41,630	42,030	42,430
			- Cabe Kecil	42,51	42,93	43,35	43,75	44,18
			3. Perkebunan (ton/ha) :					
			- Kelapa	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
			- Cabe Jamu	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
			- Jambu Mete	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62
			- Siwalan	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
			- Tembakau	0,65	0,66	0,67	0,68	0,70
			4. Peternakan (kg/ekor) :					
			- Daging Sapi	-	187,6	187,6	187,6	187,6
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD (%)	90	90	90	90	90

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

## **2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	Konsumsi beras rata2 penduduk dari data Susenas (BPS) yang diolah. Data penduduk dari BPS	$\frac{\sum \text{Produksi pangan pokok}}{\sum \text{Kebutuhan pangan pokok}} \times 100\%$	DKPP dan BPS
2	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	ton/ha	'Produktivitas merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas merupakan kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi tanaman tertentu.	$\text{Produktivitas} = \frac{\sum \text{Produksi}}{\sum \text{Luas Panen}}$	Sumber data produksi dan luas panen yang digunakan adalah data yang dirilis oleh BPS Sumenep
		1. Tanaman Pangan :	ton/ha			
		- Padi				
		- Jagung				
		- Kedele				
		- Kacang Hijau				
		- Ubi Kayu				
		2. Hortikultura :	ton/ha			
- Bawang Merah						

- Cabe Besar				
- Cabe Kecil				
3. Perkebunan :	ton/ha			
- Kelapa				
- Cabe Jamu				
- Jambu Mete				
- Siwalan				
- Tembakau				
4. Peternakan :	kg/ekor	Produktivitas daging adalah jumlah rata-rata daging (Karkas + Edible Offal) yang dihasilkan per ekor.	$\text{Produktivitas Daging Sapi} = \frac{\sum \text{Produksi Daging Sapi}}{\sum \text{Sapi yang dipotong}}$	DKPP
- Daging Sapi				
Persentase capaian kinerja PD	%	Merupakan tingkat keberhasilan atas pelaksanaan dari Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program dalam mencapai sasaran PD.	$\text{Capaian Kinerja PD} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	DKPP
		Pengukuran capaian Sub Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerjanya		

## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Berikut Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

**Tabel 2.4**

### Rencana Kerja Tahun 2023 (Sebelum Reviu)

#### Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	104
2	Meningkatkan pertumbuhan subsektor pertanian	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan		
			1. Tanaman Pangan :	ton/ha	
			- Padi		5,38
			- Jagung		3,07
			- Kedele		1,39
			- Kacang Hijau		1,36
			- Ubi Kayu		15,11
			2. Hortikultura :	kw/ha	
			- Bawang Merah		72,49
			- Cabe Besar		41,23
			- Cabe Kecil		42,93
			3. Perkebunan :	ton/ha	
			- Kelapa		1,24
			- Cabe Jamu		4,77
- Jambu Mete		0,61			
- Siwalan		0,17			
- Tembakau		0,66			
3	Meningkatkan	Meningkatnya capaian kinerja	Persentase capaian kinerja PD(%)		90

akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah			
--	------------------	--	--	--

Sumber : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep tahun 2023

**Tabel 2.5**  
**Rencana Kerja Tahun 2023 (Sesudah Reviu)**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	104
2	Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan		
			1. Tanaman Pangan :	ton/ha	
			- Padi		5,38
			- Jagung		3,07
			- Kedele		1,39
			- Kacang Hijau		1,36
			- Ubi Kayu		15,11
			2. Hortikultura :	kw/ha	
			- Bawang Merah		72,49
- Cabe Besar		41,23			

3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	- Cabe Kecil		42,93
			3. Perkebunan :	ton/ha	
			- Kelapa		1,24
			- Cabe Jamu		4,77
			- Jambu Mete		0,61
			- Siwalan		0,17
			- Tembakau		0,66
			4. Peternakan :	kg/ekor	
			- Daging Sapi		187,60
			Persentase capaian kinerja PD (%)		90

Sumber : Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep tahun 2023

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25

Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep .

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 01 bulan 11 tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep**  
**Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	<b>Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)</b>	<b>Skor</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	%	104	104
2	<b>Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian</b>	<b>PDRB sub sektor pertanian</b>	<b>Trilyun</b>	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Peningkatan produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan			
		1. Tanaman Pangan :	ton/ha		
		- Padi		5,38	5,38

		- Jagung		3,07	3,07
		- Kedele		1,39	1,39
		- Kacang Hijau		1,36	1,36
		- Ubi Kayu		15,11	15,11
		2. Hortikultura :	kw/ha		
		- Bawang Merah		72,49	72,49
		- Cabe Besar		41,23	41,23
		- Cabe Kecil		42,93	42,93
		3. Perkebunan :	ton/ha		
		- Kelapa		1,24	1,24
		- Cabe Jamu		4,77	4,77
		- Jambu Mete		0,61	0,61
		- Siwalan		0,17	0,17
		- Tembakau		0,66	0,66
		4. Petrenakan :	kg/ekor		
		- Daging Sapi		-	187,60
<b>3</b>	<b>Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>SAKIP PD</b>	<b>Nilai</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	%	90	90

Sumber data : - Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep :

**Tabel 2.7**  
**Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah	100	100	364.541.200	444.541.200
1.1.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pendukung kemandirian pangan yang tersedia	3	3	364.541.200	444.541.200

1.1.1.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1	1	150.000.000	150.000.000
1.1.2.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	1	1	200.000.000	280.000.000
1.1.3.	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1	1	14.541.200	14.541.200
<b>2.</b>	<b>PROGRAM Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan	72,00	72,00	116.435.179	116.179.979
<b>2.1.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	Data penyediaan dan penyaluran pangan kabupaten	12	12	49.179.000	48.923.800
2.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12	12	12.254.000	12.254.000
2.1.2.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	4	4	36.925.000	36.669.800
<b>2.2.</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	Angka kecukupan gizi masyarakat per kapita per tahun yang dicapai	1.850	1.850	67.256.179	67.256.179
2.2.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1	1	67.256.179	67.256.179
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100	100	12.538.600	12.538.600
<b>3.1.</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun	1	1	12.538.600	12.538.600
3.1.1.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1	1	12.538.600	12.538.600
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	87	87	41.162.900	33.368.900
<b>4.1.</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	2	2	41.162.900	33.368.900
4.1.1.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1	1	18.324.350	18.324.350
4.1.2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	22.838.550	15.044.550
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	25.109.565.544	25.449.014.376



<b>5.1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7	7	2.499.900	2.499.900
5.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	500.000	500.000
5.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	499.900	499.900
5.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	499.900	499.900
5.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	499.900	499.900
5.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	500.200	500.200
<b>5.2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2	2	23.661.229.108	23.661.233.375
5.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.640	2.640	23.660.740.258	23.660.744.525
5.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	488.850	488.850
<b>5.3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	1	1	310.123.450	310.123.450
5.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99	99	44.505.450	44.505.450
5.3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	2	265.618.000	265.618.000
<b>5.4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	6	6	733.588.243	876.664.920
5.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	3	7.494.000	10.491.000
5.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	10.000.770	13.053.270
5.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	578.688.453	604.395.070

5.4.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	6	51.784.000	76.284.000
5.4.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	62	62	60.517.000	147.337.560
5.4.6.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100	100	25.104.020	25.104.020
<b>5.5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	6	6	10.000.000	58.919.678
5.5.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	6	10.000.000	58.919.678
<b>5.6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah layanan jasa yang disediakan	3	3	305.908.844	416.408.311
5.6.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	4	305.908.844	416.408.311
<b>5.7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	3	3	86.215.999	123.164.742
5.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	4	69.275.753	96.474.496
5.7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26	26	6.930.000	16.680.000
5.7.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	2	10.010.246	10.010.246
<b>6.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan			19.527.834.046	20.618.925.746
		1. Tanaman Pangan :				
		- Padi	193.025,00	193.025,00		
		- Jagung	448.573,00	448.573,00		
		- Kedele	96,62	96,62		
		- Kacang Hijau	22.439,00	22.439,00		
		- Ubi Kayu	158.779,00	158.779,00		
		2. Hortikultura :				
		- Bawang Merah	69.449,00	69.449,00		
		- Cabe Besar	9.950,00	9.950,00		
		- Cabe Kecil	82.575,00	82.575,00		
		3. Perkebunan :				
		- Kelapa	44.820,00	44.820,00		
		- Cabe Jamu	10.435,00	10.435,00		
		- Jambu Mete	5.597,00	5.597,00		
		- Siwalan	759,95	759,95		
		- Tembakau	5.960,00	5.960,00		
		4. Peternakan				

		- Daging	5.135,00	5.135,00		
		- Telur	4.271,00	4.271,00		
<b>6.1.</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	100	100	18.520.545.740	19.623.858.920
6.1.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	12	12	14.489.911.340	14.711.224.520
6.1.2.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	110	110	4.030.634.400	4.912.634.400
<b>6.2.</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	SDG pertanian dan peternakan yang terkelola	3	3	595.134.140	833.912.660
6.2.1.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2	2	372.649.150	269.654.550
6.2.2.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	1	222.484.990	231.773.120
6.2.3.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	1	-	332.484.990
<b>6.3.</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase peningkatan populasi ternak besar	0,5	0,5	412.154.166	161.154.166
6.3.1.	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	50.000	50.000	412.154.166	161.154.166
<b>7.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Prosentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	77	77	52.769.873.373	57.249.873.373
<b>7.1.</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah prasarana yang diperbaiki	30	30	3.790.074.618	5.340.074.618
7.1.1.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1	1	1.840.000.140	1.840.000.140
7.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1	1	1.950.074.478	3.500.074.478
<b>7.2.</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	Jumlah prasarana yang dibangun	75	75	48.561.322.400	51.466.322.400
7.2.1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	101	101	29.275.000.000	29.275.000.000
7.2.2.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	19	19	2.380.000.000	2.380.000.000
7.2.3.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	41	41	9.149.860.000	9.649.860.000
7.2.4.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	64	64	7.756.462.400	10.161.462.400

7.3.	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kecamatan di Wilayah Sumber Bibit (Wilsumbit) yang dikelola	4	4	418.476.355	443.476.355
7.3.1.	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	4	4	418.476.355	443.476.355
8.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Prosentase penanganan kasus penyakit hewan	25	25	322.065.725	348.065.725
8.1.	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan	20	20	56.521.600	56.521.600
8.1.1.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	4	4	56.521.600	56.521.600
8.2.	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	115.000.000	141.000.000
8.2.1.	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	12	12	115.000.000	141.000.000
8.3.	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan medik veteriner	150	150	150.544.125	150.544.125
8.3.1.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	12	12	150.544.125	150.544.125
9.	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	100	100	54.670.500	49.270.500
9.1.	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Jumlah bencana pertanian yang dikendalikan	10	10	54.670.500	49.270.500
9.1.1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	5	5	29.670.500	29.670.500
9.1.2.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500	500	25.000.000	19.600.000
10.	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Prosentase usaha pertanian yang difasilitasi	2	2	27.734.845	40.712.900
10.1.	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah kelompok yang dibina usahanya	5	5	27.734.845	40.712.900
10.1.1.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi	2	2	27.734.845	40.712.900

<b>11.</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase peningkatan klas kelompok tani lanjut	2	2	13.001.832.109	13.026.832.082
<b>11.1.</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	100	100	13.001.832.109	13.026.832.082
11.1.1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	25	25	135.521.684	135.521.657
11.1.2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	61	61	10.373.834.000	10.373.834.000
11.1.3.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	116	116	2.492.476.425	2.517.476.425
<b>JUMLAH</b>					<b>111.348.254.021</b>	<b>117.389.323.381</b>

*Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023*

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,



sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep**  
**Tahun 2023**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)	92	99,3	107,93	Sangat Baik	DKPP <a href="https://bit.ly/PenghitungankU-DKPP-GoogleDrive">https://bit.ly/PenghitungankU-DKPP-GoogleDrive</a>
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	104	133,26	128,13	Sangat Baik	
2	Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	4,56	4,71	103,29	Sangat Baik	DKPP <a href="https://bit.ly/PenghitungankU-DKPP-GoogleDrive">https://bit.ly/PenghitungankU-DKPP-GoogleDrive</a>
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan					
		1. Tanaman Pangan :					
		- Padi	5,38	5,90	109,60	Sangat Baik	
		- Jagung	3,07	3,14	102,27	Sangat Baik	
		- Kedele	1,39	1,45	104,24	Sangat Baik	
		- Kacang Hijau	1,36	1,42	104,43	Sangat Baik	
		- Ubi Kayu	15,11	15,11	100,00	Sangat	

						Baik	
		2. Hortikultura :					
		- Bawang Merah	72,49	74,08	102,19	Sangat Baik	
		- Cabe Besar	41,23	44,88	108,85	Sangat Baik	
		- Cabe Kecil	42,93	45,07	104,98	Sangat Baik	
		3. Perkebunan :					
		- Kelapa	1,24	1,27	102,49	Sangat Baik	
		- Cabe Jamu	4,77	4,47	93,75	Sangat Baik	
		- Jambu Mete	0,61	0,65	105,81	Sangat Baik	
		- Siwalan	0,17	0,17	100,00	Sangat Baik	
		- Tembakau	0,66	0,70	106,06	Sangat Baik	
		4. Peternakan :					
		- Daging Sapi	187,6	187,6	100,00	Sangat Baik	
<b>3</b>	<b>Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>SAKIP PD</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>100,00</b>	Sangat baik	<b>DKPP</b>
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	90	90	100,00	Sangat Baik	DKPP

#### Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah memenuhi target dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 105.38 %, sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan tercapai, dan memiliki kriteria penilaian kinerja capaian sasaran strategis yang Sangat Tinggi.

Dalam sub bab ini akan disajikan evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dinas Pertanian dan Pangan hanya memiliki 2 (dua) sasaran strategis, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase ketersediaan pangan capaian kerjanya sebesar 128,13 % kriteria sangat tinggi
2. Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan capaian kinerja rata-ratanya sebesar 103,19%

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

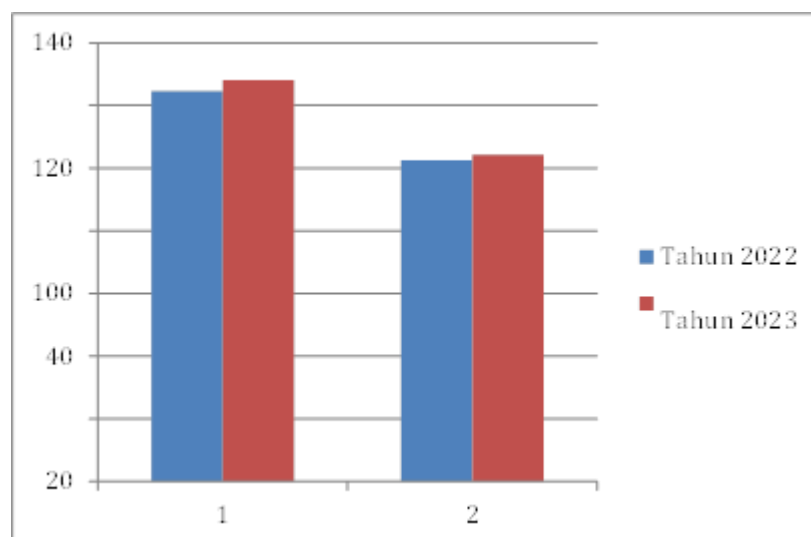
**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
<b>1</b>	<b>Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>100,00</b>	<b>92</b>	<b>99,3</b>	<b>107,93</b>
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	103	128,26	124,52	104	133,26	<b>128,13</b>
<b>2</b>	<b>Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian</b>	<b>PDRB sub sektor pertanian</b>	<b>4,54</b>	<b>4,65</b>	<b>102,42</b>	<b>4,56</b>	<b>4,71</b>	<b>103,19</b>
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan						
		1. Tanaman Pangan :						
		- Padi	5,36	5,90	110,23	5,38	5,90	109,60
		- Jagung	3,04	3,11	102,40	3,07	3,14	102,27
		- Kedele	1,39	1,42	102,37	1,39	1,45	104,24
		- Kacang Hijau	1,36	1,42	104,41	1,36	1,42	104,43
		- Ubi Kayu	15,07	15,08	100,07	15,11	15,11	100,00
		2. Hortikultura :						
		- Bawang Merah	71,79	72,8	101,41	72,49	74,08	102,19
		- Cabe Besar	40,85	40,95	100,24	41,23	44,88	108,85
		- Cabe Kecil	42,51	42,75	100,56	42,93	45,07	104,98
		3. Perkebunan :						
		- Kelapa	1,24	1,24	100,00	1,24	1,27	102,49
		- Cabe Jamu	4,77	4,77	100,00	4,77	4,47	93,75
		- Jambu Mete	0,61	0,61	100,00	0,61	0,65	105,81
		- Siwalan	0,17	0,17	99,80	0,17	0,17	100,00
		- Tembakau	0,65	0,68	104,32	0,66	0,70	106,06

		4. Peternakan :						
		- Daging Sapi	187,6	187,6	100,00	187,6	187,6	100,00
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	SAKIP PD	BB	A	A	A	A	100,00
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	90	90,91	101,01	90	90	100,00

**Uraian penjelasan tabel :**

Kinerja instansi pemerintah pada bagian ini diukur dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh tahun ini (2023) dengan capaian kinerja dari tahun sebelumnya (2022). Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki tingkat capaian kinerja pada sasaran strategis 1 (satu) sebesar 124,52%, maka capaian kinerja Sasaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,61%, dengan tingkat capaian 128,13%. Sedangkan pada capaian kinerja rata-rata pada sasaran strategis 2 (dua) sebesar 102,42%, maka capaian kinerja Sasaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,77%, dengan tingkat capaian 104,19%.



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	<b>Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)</b>	99,3	95	104,53
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	133,26	107	124,54
2	Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	4,71	4,62	101,95
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan			
		1. Tanaman Pangan :			
		- Padi	5,90	5,46	107,97
		- Jagung	3,14	3,17	98,96
		- Kedele	1,45	1,40	103,92
		- Kacang Hijau	1,42	1,36	104,12
		- Ubi Kayu	15,11	15,25	99,11
		2. Hortikultura :			
		- Bawang Merah	74,08	74,68	99,20
		- Cabe Besar	44,88	42,43	105,77
		- Cabe Kecil	45,07	44,18	102,01
		3. Perkebunan :			
		- Kelapa	1,27	1,24	102,25
		- Cabe Jamu	4,47	4,77	93,69
		- Jambu Mete	0,65	0,62	105,29
		- Siwalan	0,17	0,17	98,25

		- Tembakau	0,70	0,70	100,00
		4. Peternakan :			
		- Daging Sapi	187,6	187,6	100,00
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	SAKIP PD	A	A	100,00
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	90	90,00	100,00

**Uraian penjelasan tabel :**

Analisa capaian kinerja juga dapat dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan target capaian pada akhir RENSTRA atau target jangka menengah daerah.

Capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja 1 (satu) tahun 2023 telah melebihi apa yang menjadi target pada akhir RENSTRA Tahun 2026 dengan capaian sebesar 104.53%, sedangkan pada dengan indikator kinerja 2 (dua) tahun 2023 telah melebihi apa yang menjadi target pada akhir RENSTRA Tahun 2026 dengan capaian sebesar 100.75%, Capaian indikator kinerja sasaran yang tinggi ini disebabkan karena ketersediaan pangan di Kabupaten Sumenep jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berada dalam posisi cukup, dengan cadangan pangan yang juga telah mencukupi. Ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai kegiatan. Selain itu tingkat produktivitas tanaman pangan , hortikultura, perkebunan dan peternakan juga menunjukkan performa yang baik.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/**  
**Provinsi/Kabupaten Sumenep lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)	99,3	-	
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	133,26	-	
2	Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian	PDRB sub sektor pertanian	4,71	-	
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan		-	
		1. Tanaman Pangan :		-	
		- Padi	5,90	-	
		- Jagung	3,14	-	
		- Kedele	1,45	-	
		- Kacang Hijau	1,42	-	
		- Ubi Kayu	15,11	-	
				-	
		2. Hortikultura :		-	
		- Bawang Merah	74,08	-	
		- Cabe Besar	44,88	-	
		- Cabe Kecil	45,07	-	
				-	
		3. Perkebunan :		-	
		- Kelapa	1,27	-	
		- Cabe Jamu	4,47	-	
		- Jambu Mete	0,65	-	
		- Siwalan	0,17	-	
		- Tembakau	0,70	-	
				-	
		4. Peternakan :		-	
		- Daging Sapi	187,6	-	
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	SAKIP PD	A	-	
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	106,43	-	

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak bias kami perbandingkan pada indicator kinerja 1 karena belum kami dapatkan data yang seimbang, Sedangkan pada indicator kinerja 2 capaian kinerja bisa masih bisa dianggap baik.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	<b>Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)</b>	<b>92</b>	<b>92</b>			
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	104	104			
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah	100	100	100		
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pendukung kemandirian pangan yang tersedia	3	3	100		
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1	1	100		
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	1	1	100		
	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1	1	100		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan	72	72,2	100		
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data penyediaan dan penyaluran pangan kabupaten	12	12	100		
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12	12	100		
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	4	4	100		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan gizi masyarakat per kapita per tahun yang dicapai	1850	2770	150		
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	1	1	100		
	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100	100	100		

	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun	1	1	100		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	1	1	100		
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	87	87	100		
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	2	2	100		
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1	1	100		
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100		
	<b>Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian</b>	<b>PDRB sub sektor pertanian</b>	<b>4,56</b>	<b>4,71</b>	<b>103</b>		
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan					
		1. Tanaman Pangan :					
		- Padi	5,4	5,9	110		
		- Jagung	3,1	3,1	102		
		- Kedele	1,4	1,5	104		
		- Kacang Hijau	1,4	1,4	104		
		- Ubi Kayu	15,1	15,1	100		
		2. Hortikultura :					
		- Bawang Merah	72,49	74,08	102		
		- Cabe Besar	41,23	44,88	109		
		- Cabe Kecil	42,93	45,07	105		
		3. Perkebunan :					
		- Kelapa	1,24	1,27	102		
		- Cabe Jamu	4,77	4,47	94		
		- Jambu Mete	0,61	0,65	106		
		- Siwalan	0,17	0,17	100		
		- Tembakau	0,66	0,70	106		
		4. Peternakan :					
		- Daging Sapi	187,6	187,6	100		
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan					
		1. Tanaman Pangan :					
		- Padi	193025	194291	101		

		- Jagung	448573	446719	99,59	Terjadinya Elnino berdampak pada mundurnya musim penghujan dan berkurangnya ketersediaan air	Penambahan pompa air dan perbaikan tataguna air di tingkat kelompok
		- Kedele	96,62	135	140		
		- Kacang Hijau	22439	21151	94,26	Terjadinya Elnino berdampak pada mundurnya musim penghujan dan berkurangnya ketersediaan air	Penambahan pompa air dan perbaikan tataguna air di tingkat kelompok
		- Ubi Kayu	158779	146090	92,01	Terjadinya Elnino berdampak pada mundurnya musim penghujan dan berkurangnya ketersediaan air	Penambahan pompa air dan perbaikan tataguna air di tingkat kelompok
		2. Hortikultura :					
		- Bawang Merah	69449	69449	100		
		- Cabe Besar	9950	9020	90,65	Petani lebih banyak beralih ke cabe rawit dan tembakau karena harga lebih bagus.	Tata kelola pedagang ancabe agar harga tidak jatuh dan petani tidak rugi
		- Cabe Kecil	82575	176132	213		
		3. Perkebunan :					
		- Kelapa	44820	44850	100		
		- Cabe Jamu	10435	9392	90,00		
		- Jambu Mete	5597	5599	100		
		- Siwalan	759,95	750	98,69		
		- Tembakau	5960	6823	114		
		4. Peternakan					
		- Daging	5135	5142	100		
		- Telur	4271	6823	160		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	100	196	99,49		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	12	12	100		

	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	110	127	115		
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	SDG pertanian dan peternakan yang dikelola	3	3	100		
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2	2	100		
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	1	100		
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	1	100		
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak besar	0,5	0,5	100		
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	50000	27881	56	1. Adanya kegiatan penandaan ternak dari Pusat yang mewajibkan ternak yang di-Inseminasi Buatan (IB) harus dipasang eartag (anting telinga), sehingga banyak peternak yang menolak karena dianggap menyebabkan cacat dan harga sapi turun.2. Ketersediaan semen beku (straw) jenis Sapi Madura dari Lembaga Penyedia yang didistribusikan ke wilayah Kabupaten Sumenep sangat terbatas.	1. Adanya relaksasi pada SOP kegiatan penandaan ternak.2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penyedia mengenai pengadaan semen beku (straw) untuk tahun berikutnya.
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Prosentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	77	77	100		
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang diperbaiki	30	30	100		
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1	1	100		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1	1	100		

	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang dibangun	225	224	99		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	101	101	100		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	19	19	100		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	41	41	100		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	64	63	98	Pelaksanaan pekerjaan memasuki musim penghujan, pengeboran berulang	Melaksanakan pekerjaan lebih awal, mencari sumber air terdekat
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan di Wilayah Sumber Bibit (Wilsumbit) yang dikelola	4	4	100		
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	4	4	100		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Prosentase penanganan kasus penyakit hewan	25	40	160		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan	20	20	100		
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	4	4	100		
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100		
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	12	12	100		
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan medik veteriner	150	150	100		
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	12	12	100		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi	100	100	100		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah bencana pertanian yang dikendalikan	10	10	100		

	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	5	5	100		
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	500	500	100		ada tambahan bantuan premidari APBD Provinsi 215 Ha dan CSR Pupuk Indonesia 1.210 Ha. Total peserta AUPP Kab, Sumene p Tahun 2023 seluas 1,925 Ha, sehingga perlu sosialisasi yang masif tentang pentingnya AUPP
	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Prosentase usaha pertanian yang difasilitasi	2	2	100		
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dibina usahanya	5	5	100		
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi	2	2	100		
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase peningkatan kelas kelompok tani lanjut	2	2	100		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	100	100	100		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	25	25	100		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	61	61	100		
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	116	116	100		

	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	SAKIP PD	A	A	100		
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	90	106,43	118		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7	7	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2	2	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2640	2640	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	1	1	100		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99	99	100		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2	2	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	6	6	100		

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	3	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	100		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	100		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	6	100		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	62	75	121		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100	100	100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	6	6	100		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	12	200		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	3	3	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4	5	125		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	3	3	100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4	6	150		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26	30	115		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	2	100		

### **Uraian penjelasan tabel :**

Dari perhitungan yang telah dilakukan dengan penyajian dalam table-table diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran strategis sekaligus IKU Dinas yaitu Meningkatnya ketersediaan pangan Masyarakat dan Meningkatnya produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan Indikator Kinerjanya pada tahun 2023 secara umum telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja rata-rata 105.38% dengan predikat sangat baik.



➤ **Faktor-Faktor yang menunjang keberhasilan tersebut antara lain:**

**Sasaran Strategis 1 (satu) : Meningkatnya ketersediaan pangan Masyarakat**

- a. Motivasi dan antusiasme masyarakat petani terkait budidaya pertanian dan pemanfaatan pekarangan cukup tinggi dan menunjukkan trend yang semakin meningkat, sehingga kegiatan pengembangan pertanian masyarakat dalam bentuk pengembangan pekarangan pangan lestari, dan berbagai kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai upaya ketahanan pangan masyarakat turut mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga dan masyarakat.
- b. Pengembangan pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan turut mendukung ketersediaan aneka ragam bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan.
- c. Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyediaan infrastruktur lumbung pangan masyarakat dan fasilitasi penyaluran bantuan pangan pemerintah berupa pangan sebanyak 120.971 paket bantuan beras selama 7 bulan pada tahun 2023, dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat , serta mendapatkan dukungan dari TPID.
- d. Pengawasan mutu dan keamanan PSAT dilakukan secara intensif, bersinergi dengan instansi terkait , yaitu Dinas Perdagangan dan Kesehatan.

**Sasaran Strategis 2 (dua) : Meningkatnya produktivitas tanaman pangan , hortikultura, perkebunan dan peternakan.**

- a. Penyediaan sarana produksi pertanian dalam mendukung praktik budidaya yang baik (GAP/ Good Agricultural Practices) untuk tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan berupa hibah / bantuan benih unggul, pupuk, obat-obatan , alsintan pra dan pasca panen (handtraktor, cultivator, combine harvester, corn sheller/ alat pemipil jagung, kendaraan roda tiga, RMU dan lainnya) baik dari sumber APBD 2, provinsi maupun APBN , dari aspirasi masyarakat maupun pokir.
- b. Penyediaan infrastruktur/prasarana pertanian dalam mendukung kelancaran aktivitas pertanian dan peternakan berupa pembangunan dan rehabilitasi sumber-sumber air untuk irigasi dan bangunan untuk

penyediaan air serta bangunan untuk ketersediaan pangan serta Rumah Potong hewan (RPH) maupun Puskesmas .

- c. Kegiatan penyuluhan semakin meningkat dengan adanya tambahan SDM Penyuluh dan antusiasme masyarakat terhadap budidaya pertanian, peternakan serta semakin tinggi, sehingga perkembangan jumlah kelompok tani juga mengalami peningkatan.
- d. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan hewannya pada unit pelayanan kesehatan hewan semakin menunjukkan peningkatan. Selain itu dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis didukung oleh masyarakat yang sangat kooperatif , koordinasi antar OPD terkait, optimalisasi Unit pelayanan cepat Poskeling , serta adanya kerjasama dengan Dinas terkait seperti Penanggulangan Bencana.

➤ **Faktor – faktor yang menghambat keberhasilan atau menjadi kendala diantaranya :**

**Sasaran Strategis 1 (satu) : Meningkatnya ketersediaan pangan Masyarakat**

1. Banyak pelaku usaha pangan yang berasal dari pertanian/ peternakan telah memiliki beragam produk mentah maupun olahan, sedangkan SDM pengawasan mutu sangat terbatas sehingga tidak seluruhnya dapat terjangkau pengawasan.
2. Pengujian sampel uji mutu bahan pangan masih terbatas pada pengujian kualitatif karena belum cukup sarana dan prasarana yang memadai untuk pengujian secara kuantitatif.

**Sasaran Strategis 2 (dua) : Meningkatnya produktivitas tanaman pangan , hortikultura, perkebunan dan peternakan.**

- a. Masyarakat Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok tani tidak semuanya merupakan petani murni, sehingga tidak semuanya memiliki dasar ilmu pertanian yang baik. Kegiatan pertanian yang ada sangat tergantung pada program dari pemerintah. -
- b. Perubahan musim dan iklim el nino yang cukup ekstrim menyebabkan di beberapa wilayah kekurangan air.

- c. Adanya Edaran penandaan ternak dari Pusat yang mewajibkan ternak yang di-Inseminasi Buatan (IB) harus dipasang eartag (anting telinga), sehingga banyak peternak yang menolak karena dianggap menyebabkan cacat menjadikan harga jual sapi turun dan ketersediaan semen beku (straw) jenis Sapi Madura dari Lembaga Penyedia yang didistribusikan ke wilayah Kabupaten Sumenep sangat terbatas, sehingga menyebabkan terhambatnya proses inseminasi buatan.
- d. Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur irigasi pertanian memasuki musim penghujan, sehingga menyebabkan pengeboran berulang

➤ **Upaya solusi yang dilakukan :**

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gapoktan di wilayah Kabupaten Sumenep dalam penyediaan cadangan beras pemerintah daerah dan beras untuk ASN.
2. Pendampingan oleh penyuluh pertanian secara intensif, meningkatkan koordinasi, edukasi dan komunikasi antar petani dengan memanfaatkan media sosial, serta dengan melibatkan petani maupun kelompok tani dalam upaya kampanye kesadaran akan pangan sehat dan seimbang
3. Meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan dalam kegiatan pertanian dan pangan seperti sosialisasi B2SA
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan, asal pertanian maupun asal hewan, seperti Dinas Kesehatan
5. Penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu.
6. Meningkatkan pengawasan kesehatan hewan di peternak dan Rumah Potong Hewan, serta dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada peternak terkait kesehatan hewan.
7. Mengadakan sosialisasi mengenai Asuransi Usaha Tani Padi kepada petani padi yang ada di Kabupaten Sumenep dalam rangka menjamin rasa aman dalam bertani padi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (konsumsi)	108				menunjang
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan	128				menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah	100	menunjang
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pendukung kemandirian pangan yang tersedia	100	menunjang
				Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	100	menunjang
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	100	menunjang
				Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	100	menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan	100,277778	menunjang
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data penyediaan dan penyaluran pangan kabupaten	100	menunjang
				Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	100	menunjang
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	100	menunjang
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka kecukupan gizi masyarakat per kapita per tahun yang dicapai	150	menunjang
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	100	menunjang

				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100	menunjang
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun	100	menunjang
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	100	menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	100	menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	100	menunjang
				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	100	menunjang
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	menunjang
2	<b>Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian</b>	<b>PDRB sub sektor pertanian</b>	103			100	menunjang
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan	Peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	103			100	menunjang
		1. Tanaman Pangan :				100	menunjang
		- Padi	110			100	menunjang
		- Jagung	102			100	menunjang
		- Kedele	104			100	menunjang
		- Kacang Hijau	104			100	menunjang
		- Ubi Kayu	100			100	menunjang
						100	menunjang
		2. Hortikultura :				100	menunjang
		- Bawang Merah	102			100	menunjang
		- Cabe Besar	109			100	menunjang
		- Cabe Kecil	105			100	menunjang
						100	menunjang
		3. Perkebunan :				100	menunjang
		- Kelapa	102			100	menunjang
		- Cabe Jamu	94			100	menunjang
		- Jambu Mete	106			100	menunjang
		- Siwalan	100			100	menunjang

		- Tembakau	106			100	menunjang
						100	menunjang
		4. Peternakan :				100	menunjang
		- Daging Sapi	100			100	menunjang
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	113	menunjang
					1. Tanaman Pangan :		menunjang
					- Padi	101	menunjang
					- Jagung	100	menunjang
					- Kedele	140	menunjang
					- Kacang Hijau	94	menunjang
					- Ubi Kayu	92	menunjang
							menunjang
					2. Hortikultura :		menunjang
					- Bawang Merah	100	menunjang
					- Cabe Besar	91	menunjang
					- Cabe Kecil	213	menunjang
							menunjang
					3. Perkebunan :		menunjang
					- Kelapa	100	menunjang
					- Cabe Jamu	90	menunjang
					- Jambu Mete	100	menunjang
					- Siwalan	99	menunjang
					- Tembakau	114	menunjang
							menunjang
					4. Peternakan		menunjang
					- Daging	100	menunjang
					- Telur	160	menunjang
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	99	menunjang
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	100	menunjang
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	115	menunjang
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	SDG pertanian dan peternakan yang terkelola	100	menunjang
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	100	menunjang
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	100	menunjang
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100	menunjang

				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak besar	100	menunjang
				Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	56	menunjang
				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Prosentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	100	menunjang
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang diperbaiki	100	menunjang
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	100	menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	100	menunjang
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	100	menunjang
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100	menunjang
				<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Prosentase usaha pertanian yang difasilitasi	100	menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang dibina usahanya	100	menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi	100	menunjang
				<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase peningkatan klas kelompok tani lanjut	100	menunjang
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	100	menunjang
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	100	menunjang
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	100	menunjang
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	100	menunjang

3	<b>Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>SAKIP PD</b>	100				menunjang
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD	118				menunjang
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100	menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	100	menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	menunjang



				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	100	menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	menunjang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100	menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100	menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100	menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	menunjang
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100	menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100	menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100	menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	100	menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100	menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100	menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100	menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100	menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	menunjang

**Uraian penjelasan tabel :**

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran dinas pada tahun 2023 ini didukung oleh 10 program yang dilaksanakan pada Bidang Teknis dan 1 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat. Nomenklatur program beserta Indikator

Kinerja Program ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dan Kepmendagri 010 , dan sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2023 sebagaimana Tabel diatas , dan untuk selanjutnya akan dilakukan analisis capaian kinerja dari setiap program.

Pada Tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2023 keberhasilan capaian realisasi kinerja program hampir secara keseluruhan dapat mencapai target dengan tingkat capaian 100%, bahkan terdapat beberapa program dengan capaian lebih dari 100%, sehingga seluruh indikator kinerja mencapai predikat **Sangat Tinggi**.

### **ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 1**

Tercapainya indikator sasaran strategis 1 didukung oleh optimalnya capaian program yang terdiri dari 4 program , yaitu :

#### **1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian**

Program ini mempunyai indikator persentase kecukupan pangan daerah yang ditargetkan 100% terealisasi 100% . Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan yang ditargetkan 3 sarana pendukung kemandirian pangan terealisasi 3 sarana. Hal ini disebabkan tercapainya kinerja sub kegiatan :

1. Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan dengan indikator Jumlah lumbung pangan yang tersedia yang ditargetkan 1 unit terealisasi 1 unit atau capaian kinerja 100%. Keberhasilan tercapainya kinerja sub kegiatan disebabkan oleh :

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

- Meningkatnya antusiasme masyarakat petani dalam memproduksi beras dengan kualitas yang baik dan dengan jumlah yang cukup, menjadikan program ini menjadi mudah direalisasikan

b. Faktor SDM Pelaksana

- Penyelesaian pekerjaan penyediaan infrastruktur lumbung pangan dilakukan oleh SDM yang sudah cukup

berpengalaman di bidangnya dengan kualifikasi pejabat pengadaan yang tersertifikasi



2. Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya dengan indikator Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia yang ditargetkan 1 unit terealisasi 1 unit atau capaian kinerja 100%. Keberhasilan tercapainya kinerja sub kegiatan disebabkan oleh :

a. Faktor Kebijakan

- Kebijakan Bapak Bupati dalam mempercepat pembangunan wilayah kepulauan salah satunya menjadikan kepulauan sebagai pusat lumbung pangan sehingga perlu percepatan infrastruktur yang mendukung kebijakan tersebut. Keluaran Sub kegiatan ini berupa pengerasan jalan menuju ke lumbung pangan dan kelengkapan sumber daya berupa dynamo untuk menggerakkan mesin RMU di rumah produksi di kepulauan Arjasa.



3. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dengan keluaran sub kegiatan ini berupa koordinasi pembinaan/pembekalan berupa bintek untuk poktan penerima bantuan RMU tahun 2023 dan sebelumnya.



## 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja 1 pada program ini yaitu skor PPH di tingkat ketersediaan, tercapai dengan tingkat capaian 100,28%, Capaian kinerja ini didukung oleh 3 Sub Kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, Keluaran sub kegiatan ini berupa Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun dan dilaporkan secara periodik per bulan dan Penyusunan dokumen NBM (Neraca Bahan Makanan) serta Laporan hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan disusun secara periodik dan update per bulan, yang menunjukkan kondisi stok, pasokan dan harga berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap berbagai potensi yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga pangan strategis. Pemantauan ini diperlukan untuk melakukan aksi dalam meredam gejolak harga pangan. Data-data komoditas pangan strategis yang dipantau di pasar tersebut meliputi beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng, sayur-sayuran dan umbi-umbian.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Salah satu cara untuk menjaga ketersediaan supaya dapat terus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yaitu dengan menyediakan alternative

pangan pokok dengan bahan yang berasal dari sumber daya lokal. Pada sub kegiatan ini tahun 2023 menyediakan bahan pangan berupa Garut beserta peralatan pengolahan dan pelatihan untuk mengolah bahan pangan tersebut.

- 3) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Keluaran sub kegiatan ini berupa memiliki keluaran penyusunan Dokumen dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen. Aspek kuantitas dan kualitas sangat penting pada pemenuhan kebutuhan pangan supaya keragaman pangan dan keseimbangan gizi terjamin. Tubuh manusia memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman sehingga konsumsi pangan yang beragam sangatlah penting.

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Pada Tahun ini sub kegiatan ini juga dilakukan dengan mengikutsertakan PKK dalam Lomba Cipta Medu di tingkat Provinsi dengan menu lokas dengan gizi seimbang, dan mendapatkan penghargaan sebagai juara 3.

### **3. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja pada program ini yaitu : Persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan tercapai sebesar 100%. Program ini didukung oleh 2 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini yang memiliki 1 keluaran berupa Laporan Pengujian Keamanan Pangan Laporan Pengujian Keamanan Pangan dengan target 1 laporan tercapai 1 laporan. Pengujian keamanan pangan dilakukan terhadap beberapa komoditas pangan segar asal tumbuhan (PSAT) untuk mengetahui apakah produk PSAT yang beredar di wilayah kabupaten Sumenep terjamin aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. sayuran, buah-buahan, dan beras. Hasil dari kegiatan pengambilan sampel PSAT selanjutnya dilakukan pengujian terhadap

sampel uji pada laboratorium uji mutu bahan pangan dan akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan sosialisasi.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki keluaran berupa penyediaan 1 kit uji pestisida dan 1 kit uji formalin. Pengujian dilakukan pada pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang berpotensi mengandung pestisida atau formalin di tingkat produsen dan pasar di wilayah Kabupaten Sumenep. Sarana pengujian menghasilkan data kualitatif dengan observasi perubahan warna pada sampel yang diuji. Pengujian secara kuantitatif tidak dimungkinkan untuk dilakukan karena membutuhkan ruang laboratorium dan peralatan yang relatif mahal. Melalui penyediaan sarana ini diharapkan dapat memberikan informasi persentase kesediaan pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan, membuat kebijakan terkait penanganan PSAT yang mengandung pestisida dan formalin serta meningkatkan pengawasan keamanan pangan.



#### 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja pada program ini yaitu : Persentase wilayah bebas kerawanan pangan tercapai sebesar 100.00%, berdasarkan hasil analisa peta ketahanan dan kerentanan pangan yang menunjukkan seluruh wilayah di Kabupaten Sumenep bebas dari kerawanan pangan.

Capaian ini didukung oleh 1 Sub Kegiatan yaitu : Penyusunan, Pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang memiliki 1 keluaran yaitu berupa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun. Dalam Peta tersebut dapat diidentifikasi beberapa kriteria daerah terhadap kerawanan pangan.

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 2**

### **1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program ini mempunyai indikator Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang terealisasi 113% . Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan yang ditargetkan dan didukung tercapainya kinerja 6 sub kegiatan :

1. Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan capaian kinerja 100%. Keberhasilan tercapainya kinerja sub kegiatan disebabkan oleh :
  - a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.
    - Pengembangan varietas lokal Prancak Ni/N2 menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan budidaya Tembakau pada tahun 2023
    - Sarana pendukung pertanian yang diterimakan kepada kelompok tani berupa , benih, pupuk NPK, alsintan berupa hendtraktor 24 unit, kendaraan Roda 3 34 unit, RMU sebanyak 6 unit pompa air, alat perajang 3 unit
    - Dilakukan Pengembangan Diversifikasi tanaman Temabkau dengan substitusi tanaman Alpukat beserta saprodinya
    - Pengembangan 2 poktan untuk kegiatan P2L yang dilakukan di 2 kecamatan
  - b. Faktor SDM Pelaksana
    1. Antusiasme petani Tembakau dalam meningkatkan kualitas bahan baku Tembakau dengan budidaya yang baik (GAP) sehingga proses pembibitan di 30 lokasi , dan proses budidaya berjalan dengan baik dan sukses.

2. Adanya pendampingan yang intensif dari para penyuluh di lapangan sehingga ketika terjadi kendala dalam pencapaian output bias diantisipasi dan dicarikan solusi
2. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. dengan capaian kinerja 115% dari target 110 jumlah pendampingan tercapai 127 Pada sub kegiatan ini pendampingan dilakukan dalam rangka penyerahan bantuan hibah yang berupa alsintan pra dan pasca panen, bantuan modal untuk budidaya dan juga bantuan pupuk.
3. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman. Dengan capaian kinerja 100% dari target 2 SDG yang dilakukan penjaminan kelestariannya tercapai 2 SDG yaitu Timun dilakukan pelepasan varietas dan Bawang merah yang dilakukan IG nya Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Pengerjaannya dilakukan dengan berkerjasama dengan lembaga tersertifikasi yaitu BRIN.
4. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. Dengan capaian kinerja 100% dari target 1 tercapai 1 SDG yang dilakukan pemanfaatan, yaitu komoditi Jagung. Budidaya Jagung Hibrida dengan saprodinya dilakukan demplot di lahan BPP.
5. Peningkatan SDG Hewan/Tanaman. Dengan capaian kinerja 100% dari target 1 tercapai 1 SDG yang dilakukan peningkatan, yaitu komoditi Tembakau, pembenihan dilakukan di areal kebun dinas seluas 2 ha.
6. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak. Dengan capaian kinerja 56% dari target 50000 tercapai 27881 bibit bersertifikat yang dilakukan pperedaran di kabupaten Sumenep.

## **2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Program ini mempunyai indikator Prosentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik yang ditargetkan 77% terealisasi 77% sehingga capaian kinerja sebesar 100% . Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan yang ditargetkan 2 kegiatan pendukung dan didukung oleh kinerja sub kegiatan :

1. Sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan



Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B dengan capaian kinerja 100%. ditargetkan 1 lokasi LP2B terealisasi 1 lokasi di daerah lahan Marjinal di daerah kecamatan Rubaru.

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

- Dukungan program dan anggaran yang cukup besar dan terintegrasi memudahkan pelaksanaan subkegiatan ini tercapai dengan sangat baik.

b. Faktor SDM Pelaksana

- Adanya fasilitator desa (fasdes) yang mendampingi masing-masing lokasi yang direkrut dari luar dinas, menjadikan program ini bias berjalan dengan baik

2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya, dengan capaian kinerja 100% dari target 1 tercapai 1 pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi.
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dengan capaian kinerja 100% dari target 101 unit tercapai 101 unit yang jaringan irigasi usaha tani yang dibangun berupa rumah pompa dan jaringan irigasi.
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian dengan capaian kinerja 100% dari target 19 unit tercapai 19 unit Embung air yang dibangun di beberapa kecamatan yang kekurangan sumber air.
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dengan capaian kinerja 100% dari target 41 unit tercapai 41 unit jalan usaha tani yang dibangun sebagai upaya memperlancar akses menu areal pertanian

### 3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja pada program ini yaitu : Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali tercapai sebesar 100%, berdasarkan formulasi perhitungan jumlah penyakit hewan menular strategis yang terkendali sebanyak 25 penyakit dari 40 jenis penyakit hewan menular strategis. Capaian ini didukung oleh Sub Kegiatan yaitu :

- 1). Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis yang memiliki keluaran :
  - Data dan informasi Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dengan target 50 unit tercapai 103 unit. Data dan informasi terkait pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis mencakup beberapa kegiatan diantaranya pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan pada peternak, kelompok ternak dan pasar tiban hewan kurban serta surveilans kasus Penyakit Hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis di masyarakat, pengawasan obat hewan dan pembinaan unit usaha pada praktik dokter hewan/petshop/poultryshop, serta pembinaan dan pengawasan unit usaha produk asal hewan.
  - Pelaksanaan vaksinasi PMK pada hewan rentan penyakit mulut dan kuku pada tahun 2023 dilaksanakan di 27 kecamatan di kabupaten Sumenep

- 2). Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki keluaran :

Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan dengan target 12 wilayah daerah lalu lintas hewan (11 daratan dan 1 kepulauan) tercapai 12 wilayah dengan capaian realisasi mencapai 100%, disebabkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan hewannya meningkat terutama disaat perubahan musim agar tetap terjaga kesehatannya dan ada penambahan SDM, sarana prasarana serta fasilitas lainnya untuk kenyamanan klien dan pasien. Sedangkan penghambatnya ada beberapa fasilitas pelayanan yang kurang dan wilayah jangkauan di kepulauan yang cukup jauh.



#### 4 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini mempunyai indikator Persentase bencana pertanian yang ditanggulangi yang ditargetkan 100% terealisasi 100% . Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Hal ini disebabkan tercapainya kinerja sub kegiatan :

a) **Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

dengan capaian kinerja 100% dari target 5 paket penyediaan obat tercapai 5 paket dalam rangka mengantisipasi timbulnya hama dan penyakit tanaman.

b) **Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**

dengan capaian kinerja 100% dari target 500 hektar tercapai 500 hektar dalam rangka mengantisipasi adanya bencana iklim yang bias tercover dengan adanya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

#### 5 Program Perizinan Usaha Pertanian

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja 2 pada progam ini tercapai 100% dari target 100 tercapai 100% dengan indikator persentase perizinan usaha yang difasilitasi . Capaian ini didukung oleh 1 Sub Kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

Pelaku usaha Sektor Pertanian berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No.5 Tahun 2019 tentang tata cara Perizinan berusaha Sektor Pertanian (Permentan 5/2019). Ruang Lingkup meliputi izin usaha , pendaftaran usaha, izin Pemasukan dan Pengeluaran , Rekomendasi Pendaftaran, perlindungan dan

pendaftaran, dan Penetapan. Terdapat 2 Jenis Izin di Sektor Pertanian, Pertama izin usaha yang meliputi Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Tanaman Pangan, Izin Usaha Hortikultura, izin Usaha Peternakan, izin Usaha Obat Hewan , pendaftaran Usaha Perkebunan, pendaftaran Usaha tanaman Pangan , pendaftaran Usaha Budi daya Hortikultura, dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Dan Kedua Izin Usaha Komersial atau Operasional yang meliputi : 1. Izin Pemasukan dan pengeluaran Benih Tanaman, 2 Izin Pemasukan dan Pengeluaran benih/ bibit ternak , 3. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber daya Genetik. Dan pada tahun 2023 sub kegiatan ini keluarannya berupa fasilitasi keikutsertaan dalam agrifest 2023 di provinsi Jawa Timur , dan pada even ini DKPP mendapatkan penghargaan sebagai penyaji Pameran Terbaik dan gelar pasar murah di kecamatan.

#### **6. Program Penyuluhan Pertanian**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja pada program ini yaitu : Persentase peningkatan kelas kelompok tani lanjut tercapai 100%, didukung oleh kinerja kegiatan yang ditargetkan 100% terealisasi 100%. Capaian ini didukung oleh 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, yang memiliki 1 indikator kinerja Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya, dengan 2 keluaran sub kegiatan :
  - a) Pembinaan penyuluh dengan kompetensi memadai melalui pelatihan virtual atau non virtual. Pembinaan ini diikuti oleh semua penyuluh di seluruh kecamatan di kabupaten Sumenep
  - b) Program Penyuluh Pertanian yang tersusun.  
Penyuluh Pertanian bertanggung jawab menyusun Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kemantren. Berdasarkan Permentan No 47 Tahun 2016 tentang Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian adalah perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis, sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, yang memiliki 1 indikator kinerja dan 1 keluaran sub kegiatan yakni pembinaan kelompok tani dengan program hulu dan hilirisasi komoditi Bawang Merah . Target tahun 2023 untuk kelompok tani yang dikembangkan adalah sebanyak 61 kelompok, dan tercapai 100 % .
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, yang memiliki 2 keluaran sub kegiatan yaitu pengadaan sarana dan prasarana fisik di BPP dan pelaksanaan pelatihan tematik di 27 kecamatan/BPP . Sasaran kegiatan ini adalah penyuluh dan kelompok tani, harapannya dengan tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan ini dapat membantu kelancaran kegiatan penyuluhan dan meningkatkan produktivitas petani di wilayah kabupaten Sumenep.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	444.541.200	443.982.250	99,87
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	444.541.200	443.982.250	99,87
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	150.000.000	150.000.000	100,00
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	280.000.000	279.692.750	99,89
	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	14.541.200	14.289.500	98,27
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	116.179.979	112.021.450	96,42
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	48.923.800	46.991.150	96,05
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12.254.000	11.239.500	91,72

	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	36.669.800	35.751.650	97,50
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	67.256.179	65.030.300	96,69
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	67.256.179	65.030.300	96,69
3	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>12.538.600</b>	<b>12.487.250</b>	<b>99,59</b>
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	12.538.600	12.487.250	99,59
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	12.538.600	12.487.250	99,59
4	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>33.368.900</b>	<b>32.355.050</b>	<b>96,96</b>
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	33.368.900	32.355.050	96,96
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	18.324.350	17.431.050	95,13
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	15.044.550	14.924.000	99,20
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>25.449.014.376</b>	<b>19.477.220.430</b>	<b>76,53</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>2.499.900</b>	<b>2.343.750</b>	<b>93,75</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>500.000</b>	<b>444.250</b>	<b>88,85</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>499.900</b>	<b>473.000</b>	<b>94,62</b>
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>499.900</b>	<b>441.250</b>	<b>88,27</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>499.900</b>	<b>499.250</b>	<b>99,87</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>500.200</b>	<b>486.000</b>	<b>97,16</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>23.661.233.375</b>	<b>17.723.701.244</b>	<b>74,91</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>23.660.744.525</b>	<b>17.723.238.244</b>	<b>74,91</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>488.850</b>	<b>463.000</b>	<b>94,71</b>
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>310.123.450</b>	<b>309.968.738</b>	<b>99,95</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>44.505.450</b>	<b>44.352.000</b>	<b>99,66</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>265.618.000</b>	<b>265.616.738</b>	<b>100,00</b>
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>876.664.920</b>	<b>873.812.013</b>	<b>99,67</b>

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.491.000	10.489.000	99,98
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.053.270	13.043.100	99,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	604.395.070	603.984.500	99,93
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.284.000	76.260.000	99,97
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.337.560	145.457.793	98,72
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.104.020	24.577.620	97,90
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.919.678	55.798.000	94,70
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.919.678	55.798.000	94,70
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.408.311	388.699.683	93,35
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	416.408.311	388.699.683	93,35
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.164.742	122.897.002	99,78
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.474.496	96.292.002	99,81
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.680.000	16.596.000	99,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.010.246	10.009.000	99,99
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20.618.925.746	19.076.243.256	92,52
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	19.623.858.920	18.185.844.270	92,67
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	14.711.224.520	13.467.555.520	91,55
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.912.634.400	4.718.288.750	96,04
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	833.912.660	729.811.312	87,52
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	269.654.550	200.584.512	74,39
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	231.773.120	203.128.300	87,64
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	332.484.990	326.098.500	98,08

	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	161.154.166	160.587.674	99,65
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	161.154.166	160.587.674	99,65
7	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>57.249.873.373</b>	<b>56.952.055.550</b>	<b>99,48</b>
	Pengembangan Prasarana Pertanian	5.340.074.618	5.333.828.973	99,88
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1.840.000.140	1.840.000.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	3.500.074.478	3.493.828.973	99,82
	Pembangunan Prasarana Pertanian	51.466.322.400	51.198.630.776	99,48
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	29.275.000.000	29.275.000.000	100,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	2.380.000.000	2.380.000.000	100,00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9.649.860.000	9.617.448.000	99,66
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	10.161.462.400	9.926.182.776	97,68
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	443.476.355	419.595.801	94,62
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	443.476.355	419.595.801	94,62
8	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>348.065.725</b>	<b>333.447.464</b>	<b>95,80</b>
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	56.521.600	55.578.784	98,33
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	56.521.600	55.578.784	98,33
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	141.000.000	133.897.450	94,96
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	141.000.000	133.897.450	94,96



	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.544.125	143.971.230	95,63
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.544.125	143.971.230	95,63
9	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>49.270.500</b>	<b>48.925.000</b>	<b>99,30</b>
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	49.270.500	48.925.000	99,30
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	29.670.500	29.325.000	98,84
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	19.600.000	19.600.000	100,00
10	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>40.712.900</b>	<b>40.371.700</b>	<b>99,16</b>
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.712.900	40.371.700	99,16
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	40.712.900	40.371.700	99,16
11	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>13.026.832.082</b>	<b>11.763.742.977</b>	<b>90,30</b>
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>13.026.832.082</b>	<b>11.763.742.977</b>	<b>90,30</b>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	135.521.657	135.283.250	99,82
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	10.373.834.000	9.166.762.674	88,36
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.517.476.425	2.461.697.053	97,78

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	92	99,3	108	606.628.679	600.846.000	99	9
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	104	133,26	128	606.628.679	600.846.000	99	29
2	Meningkatkan pertumbuhan sub sektor pertanian	4,56	4,71	103	91.333.680.326	88.214.785.947	97	7
	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan			103	91.333.680.326	88.214.785.947	97	7
	1. Tanaman Pangan :							
	- Padi	5,38	5,90	110				
	- Jagung	3,07	3,14	102				
	- Kedele	1,39	1,45	104				
	- Kacang Hijau	1,36	1,42	104				
	- Ubi Kayu	15,11	15,11	100				
	2. Hortikultura :							
	- Bawang Merah	72,49	74,08	102				
	- Cabe Besar	41,23	44,88	109				
	- Cabe Kecil	42,93	45,07	105				
	3. Perkebunan :							
	- Kelapa	1,24	1,27	102				
	- Cabe Jamu	4,77	4,47	94				
	- Jambu Mete	0,61	0,65	106				
	- Siwalan	0,17	0,17	100				
	- Tembakau	0,66	0,70	106				
	4. Peternakan :							
	- Daging Sapi	187,6	187,6	100				
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	A	A	100	25.449.014.376	19.477.220.430	77	23
	Meningkatnya capaian kinerja Perangkat Daerah	90	106,43	118	25.449.014.376	19.477.220.430	77	42

**Note:**

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

### Uraian penjelasan tabel :

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase capaian atau penyerapan anggaran. Penggunaan sumber daya akan dikatakan efisien apabila persentase capaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi keuangan atau penyerapan anggaran.

Dapat dilihat dari Tabel di atas bahwa persentase kinerja program pada Sasaran strategis 1 sebesar 128 % lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran 99%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis 1 telah tercapai secara **EFISIEN** dengan tingkat efisiensi sebesar 29 % atau setara Rp. 174.182.317,- dan pada Sasaran strategis 2 sebesar 103 % lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran 97%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis 2 juga telah tercapai secara **EFISIEN** dengan tingkat efisiensi sebesar 7% atau setara Rp. 6.393.357.623. Dan dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan IKU Dinas telah tercapai secara **EFISIEN**.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

### Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	100	100	100	444.541.200	443.982.250	100	0
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3	3	100	444.541.200	443.982.250	100	0
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1	1	100	150.000.000	150.000.000	100	-
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1	1	100	280.000.000	279.692.750	100	0
	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1	1	100	14.541.200	14.289.500	98	2
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	72,00	72,2	100	116.179.979	112.021.450	96	4

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12	12	100	48.923.800	46.991.150	96	4
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12	12	100	12.254.000	11.239.500	92	8
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	4	100	36.669.800	35.751.650	97	3
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.850	2770	149,73	67.256.179	65.030.300	97	53
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	1	1	100	67.256.179	65.030.300	97	3
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.538.600</b>	<b>12.487.250</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1	1	100	12.538.600	12.487.250	100	0
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	1	100	12.538.600	12.487.250	100	0
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>33.368.900</b>	<b>32.355.050</b>	<b>97</b>	<b>3</b>
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	2	2	100	33.368.900	32.355.050	97	3
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	100	18.324.350	17.431.050	95	5
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	100	<b>15.044.550</b>	<b>14.924.000</b>	<b>99</b>	<b>1</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25.449.014.376</b>	<b>19.477.220.430</b>	<b>77</b>	<b>23</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100	<b>2.499.900</b>	<b>2.343.750</b>	<b>94</b>	<b>6</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	<b>500.000</b>	<b>444.250</b>	<b>89</b>	<b>11</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100	<b>499.900</b>	<b>473.000</b>	<b>95</b>	<b>5</b>
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	1	100	<b>499.900</b>	<b>441.250</b>	<b>88</b>	<b>12</b>
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	1	100	<b>499.900</b>	<b>499.250</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100	<b>500.200</b>	<b>486.000</b>	<b>97</b>	<b>3</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	2	100	<b>23.661.233.375</b>	<b>17.723.701.244</b>	<b>75</b>	<b>25</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>2.640</b>	2640	100	<b>23.660.744.525</b>	<b>17.723.238.244</b>	<b>75</b>	<b>25</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	100	<b>488.850</b>	<b>463.000</b>	<b>95</b>	<b>5</b>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	100	<b>310.123.450</b>	<b>309.968.738</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>99</b>	99	100	<b>44.505.450</b>	<b>44.352.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2	2	100	265.618.000	265.616.738	100	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	6	100	876.664.920	873.812.013	100	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	3	100	10.491.000	10.489.000	100	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100	13.053.270	13.043.100	100	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100	604.395.070	603.984.500	100	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	6	100	76.284.000	76.260.000	100	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	75	100	147.337.560	145.457.793	99	1
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100	100	25.104.020	24.577.620	98	2
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	6	100	58.919.678	55.798.000	95	5
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	12	100	58.919.678	55.798.000	95	5
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	100	416.408.311	388.699.683	93	7
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	5	100	416.408.311	388.699.683	93	7
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	100	123.164.742	122.897.002	100	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	6	100	96.474.496	96.292.002	100	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30	30	100	16.680.000	16.596.000	99	1
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	100	10.010.246	10.009.000	100	0
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			113	<b>20.618.925.746</b>	<b>19.076.243.256</b>	<b>93</b>	<b>20</b>
	1. Tanaman Pangan :							
	- Padi	193.025	194.291	101				
	- Jagung	448.573	446.719	100				
	- Kedele	97	135	140				
	- Kacang Hijau	22.439	21.151	94				
	- Ubi Kayu	158.779	146.090	92				
	2. Hortikultura :							
	- Bawang Merah	69.449	69.449	100				
	- Cabe Besar	9.950	9.020	91				
	- Cabe Kecil	82.575	176.132	213				
	3. Perkebunan :							

- Kelapa	44.820	44850	100				
- Cabe Jambu	10.435	9392	90				
- Jambu Mete	5.597	5599	100				
- Siwalan	760	750	99				
- Tembakau	5.960	6823	114				
4. Peternakan							
- Daging	5.135	5142	100				
- Telur	4.271	6823	160				
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	197	196	99	19.623.858.920	18.185.844.270	93	7
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12	12	100	14.711.224.520	13.467.555.520	92	8
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	110	127	115	4.912.634.400	4.718.288.750	96	19
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	100	833.912.660	729.811.312	88	12
Penjaminan Kemumian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	2	2	100	269.654.550	200.584.512	74	26
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1	1	100	231.773.120	203.128.300	88	12
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	1	100	332.484.990	326.098.500	98	2
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,5	0,5	100	161.154.166	160.587.674	100	0
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	50.000	27881	56	161.154.166	160.587.674	100	(44)
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>77</b>	<b>70</b>	<b>91</b>	<b>57.249.873.373</b>	<b>56.952.055.550</b>	<b>99</b>	<b>(9)</b>
Pengembangan Prasarana Pertanian	30	19	63	5.340.074.618	5.333.828.973	100	(37)
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1	1	100	1.840.000.140	1.840.000.000	100	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1	1	100	3.500.074.478	3.493.828.973	100	0
Pembangunan Prasarana Pertanian	226	224	99	51.466.322.400	51.198.630.776	99	(0)
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	101	101	100	29.275.000.000	29.275.000.000	100	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	19	19	100	2.380.000.000	2.380.000.000	100	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	41	41	100	9.649.860.000	9.617.448.000	100	0

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	64	63	98,44	10.161.462.400	9.926.182.776	98	1
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4	4	100	443.476.355	419.595.801	95	5
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	4	4	100	443.476.355	419.595.801	95	5
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	25	40	160	348.065.725	333.447.464	96	64
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	20	20	100	56.521.600	55.578.784	98	2
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4	4	100	56.521.600	55.578.784	98	2
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	141.000.000	133.897.450	95	5
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12	12	100	141.000.000	133.897.450	95	5
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	150	150	100	150.544.125	143.971.230	96	4
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	12	100	150.544.125	143.971.230	96	4
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100	100	100	49.270.500	48.925.000	99	1
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	10	10	100	49.270.500	48.925.000	99	1
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5	5	100	29.670.500	29.325.000	99	1
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500	500	100	19.600.000	19.600.000	100	-
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	2	2	100	40.712.900	40.371.700	99	1
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	5	100	40.712.900	40.371.700	99	1
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	2	2	100	40.712.900	40.371.700	99	1
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2	2	100	13.026.832.082	11.763.742.977	90	10
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	100	100	13.026.832.082	11.763.742.977	90	10
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	25	25	100	135.521.657	135.283.250	100	0
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	61	61	100	10.373.834.000	9.166.762.674	88	12
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	116	116	100	2.517.476.425	2.461.697.053	98	2

### **Uraian penjelasan tabel :**

Seluruh program yang mendukung tercapainya sasaran strategis perangkat daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan secara keseluruhan memiliki persentase capaian kinerja anggaran/keuangan rata-rata sebesar 92,25 %.

Dan atas realisasi anggaran dan berdasarkan capaian kinerja tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memperoleh Penghargaan dari Bapak Bupati Sumenep sebagai Peingkat ke-3 atas prestrasinya dalam mengawal capaian kinerja perangkat daerah tahun 2023.

### **Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian banyak melakukan kolaborasi maupun kerjasama lintas sektor bersama OPD lain yang terkait, maupun dengan institusi di luar Pemerintah Kabupaten Sumenep, diantaranya :

#### **1. Menginisiasi adanya Learning Center Bawang Merah sebagai Pusat Studi Bawang Merah dari Hulu ke Hilir bekerjasama dengan IPB**

Dengan bekerjasama dengan IPB untuk pembentukan learning center yang diawali dengan pertemuan tanggal 21 Juni 2023 dan rapat lanjutan penandatanganan MoU pada tanggal 6 Juli 2023 yang bertempat di Ruang Sidang Fakultas Pertanian IPB wing 19 level 5 Bogor.





## 2. Memfasilitasi Pemasokan Produk Hasil Pertanian melalui Mou/ Kerjasama dengan Beberapa Off Taker

- Terjalinnya Kerjasama Permata Indah Rubaru dengan Perusahaan Importir Ben Helen International Trading dengan Preorder Bawang Goreng Original sebanyak 1.680 Pcs ke Den Haag – Belanda.



- Terjalinnya Kerjasama Permata Indah Rubaru dengan PT. Semeru Indonesia Maju (GOORITA) Eksportir Produk UMKM jangka waktu 1 Tahun dengan preorder 100 Kg Bawang Goreng Original.



- Kerjasama dengan PT. Eden Pangan Indonesia tentang kepeminatan Kerjasama Dunia Usaha Produk Bawang Goreng dan Pasta Bawang.



- Kerjasama dengan Islamic Chef Culinary Indonesia (ICCI) tentang pemesanan aneka olahan bawang merah produksi PT. PIR untuk di Saudi Arabia.



## **Inovasi / Terobosan Dinas yang Mendukung Pencapaian Kinerja**

Beberapa inovasi telah dikembangkan oleh Dinas dalam upaya mendukung pencapaian kinerja organisasi, maupun dalam rangka meningkatkan pendapatan. Salah satu inovasi yang dikembangkan bahkan telah mengantarkan Kabupaten Sumenep menerima penghargaan dalam Penganugerahan Award Ketahanan Pangan dalam rangka Hari Pangan Nasional Tahun 2023. Inovasi-inovasi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu :

### **1. Gelar Lapang Inovasi Pertanian (GLIP) Padi dengan Optimalisasi Lahan Kering**

Lokasi di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep  
Inovasi ini bertujuan :

- Meningkatnya indeks pertanaman Padi dari Pola tanam Padi-Padi-Jagung menjadi tanam Padi 3 kali (IP 300), yaitu: Padi-Padi-Padi. Strategi yang digunakan adalah dengan pengenalan 7 varietas unggul baru yang tahan kekeringan (ditanam di daerah minim persediaan air) yang semula luasan 10 Ha menjadi seluas 115 Ha;
- Menjadikan dan menginisiasi desa mandiri benih padi VUB tahan kekeringan;

- Meningkatkan provitas padi mendukung kedaulatan pangan tingkat rumah tangga, regional, maupun nasional;

Tidak hanya cukup atau berhenti pada inovasi peningkatan IP, namun KWT Kasih Ibu di Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk juga membudidayakan padi yang menghasilkan beras hitam, beras merah dan memproduksi beras kualitas medium.



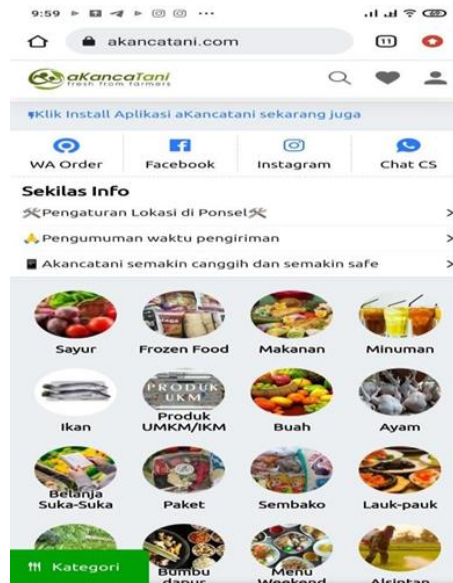
**2. Pemanfaatan Lahan Marginal untuk Budidaya Bawang Merah dari Hulu ke Hilir di Kecamatan Rubaru dan Pasongsongan.**



**3. Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman Padi (IP 400) di beberapa Kecamatan**



- 4. Digitalisasi Pemasaran Produk Hasil Pertanian melalui akancatani.com**  
Pemasaran Hasil Produk Pertanian dengan aplikasi di smartphone dan website dengan harapan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memperpendek rantai pemasaran sehingga petani mendapatkan hasil/income yang lebih besar.



- 5. Membangun RPH dengan Sertifikasi halal**



## 6. Pos Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling (Pos Keling)

Melakukan pelayanan keswan dengan jemput bola karena keterbatasan Dokter Hewan (Medik Veteriner) dan Tenaga Paramedik Veteriner sehingga pelayanan lebih bersifat mobile, lebih luas jangkauannya karena menggunakan mobil layanan.



## 7. Menumbuhkan Poktan dan Gapoktan sebagai Penangkar Benih Di Kecamatan Gapura

POKTAN BUDI SETIA DESA GAPURA BARAT Varietas Inpari 42 : 3 Ton (label biru) 2023 : Varietas Inpari 42 : 10 ton (label biru) Varietas Cakrabuana : 1 ton (label biru) Varietas Inpari 48 : 2 ton (label biru).

GAPOKTAN BAROKAH JAYA DESA BERAJI No. Ijin. 0028/UPT.PSBTPH/PRD-PNG/SMP/IV/2023 Produksi Benih : 2023 : Varietas Inpari 42 : 5 ton (label biru)



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 107,93 % (kategori sangat baik).
- Tujuan 2 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,29% (kategori sangat baik).
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 128,13% (kategori sangat baik).
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,19% (kategori sangat baik).
- Sasaran Program Bidang sekretariat terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 76,53% (kategori baik).

- Sasaran Program Bidang teknis terdiri dari 10 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,15 % (kategori sangat baik).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 117.389.323.381 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 108.292.852.377 , dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 92,25% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 8,75%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep,       Maret 2024

KEPALA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN SUMENEP

**CHAINUR RASYID, SE, M.Si**  
NIP. 19691113 199503 1 003  
Pembina Utama Muda



# LAMPIRAN

## SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH

## MATRIKS RENSTRA

## **SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

## **PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH**



# LKjIP DKPP 2023